

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan (Undang-Undang No 22 tahun 2009). Seiring dengan berkembangnya zaman, transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan sebuah daerah khususnya transportasi jalan. Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2005).

Meningkatnya pergerakan lalu lintas yang semakin tinggi dari tahun ke tahun memengaruhi kondisi transportasi menjadi semakin buruk jika tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi jalan yang memadai sehingga dapat menimbulkan masalah transportasi jalan yang sering terjadi yaitu kecelakaan. Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan.

Angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Indonesia mengalami peningkatan pada minggu ke-39 2020. Kenaikan mencapai 1,28% dibandingkan minggu sebelumnya. Jumlah kecelakaan pada minggu ke-38 sebanyak 1.089 kejadian. Sebanyak 201 orang meninggal, 142 orang luka berat, 1.313 orang luka ringan dan kerugian materi sebesar Rp 1,9 miliar. Sedangkan jumlah kecelakaan pada minggu ke-39 tercatat sebanyak 1.103 kejadian. Sebanyak 226 orang, meninggal, 129 orang luka berat, 1.280 orang luka ringan dengan kerugian materi mencapai Rp 1,7 miliar.

Amanat di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu pada pasal 203 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada ayat selanjutnya, disebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sejalan dengan amanat di dalam undang-undang tersebut, maka pemerintah dalam hal ini menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan untuk jangka waktu 25 tahun, yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2035.

RUNK Jalan disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinasi dan selaras. RUNK Jalan ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan keselamatan jalan di wilayahnya. Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban pasca kecelakaan.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten terpadat di Jawa Barat. Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 12 kelurahan dan 412 desa. Pada tahun 1980 jumlah penduduk 1.331.690 jiwa, pada tahun 1990 tercatat 1.648.021 jiwa, pada tahun 2000 tercatat 1.931.068 jiwa dan pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 2.099.089 jiwa dengan luas wilayah 984,52 km² dan sebaran penduduk 2.132 jiwa/km². Dengan tingginya mobilitas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya akan menjadi sebuah permasalahan lalu lintas dan transportasi jalan di masa yang akan datang apabila tidak dilakukan pengembangan sarana dan prasarana dibidang lalu lintasnya. Melihat kondisi tersebut, maka perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah-masalah transportasi yang kemungkinan akan terjadi. Solusi yang dapat diperoleh adalah dengan cara melakukan kajian dan mempelajari tentang ilmu-ilmu yang digunakan, teknologi serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas.

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) merupakan perguruan tertinggi kedinasan dibawah naungan Kementerian Perhubungan yang terletak di Kota Tegal. Terdapat 3 program studi yang ada di PKTJ, yaitu Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif dan Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari masing-masing program studi, para taruna-taruni melaksanakan Praktek Kerja Profesi. Praktek Kerja Profesi (PKP) merupakan suatu kegiatan praktek lapangan yang dilaksanakan di luar kampus PKTJ. Program kegiatan ini diadakan dalam rangka memberi kesempatan kepada para taruna-taruni untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja secara nyata dan pengalaman ilmu lainnya. Dan diharapkan setelah lulus taruna dapat terjun langsung ke dunia kerja. Kegiatan ini merupakan kewajiban dari pembelajaran yang ada di Politeknik Keselamatan Ttransportasi Jalan (PKTJ) karena merupakan Pendidikan vokasi yang berbasis pada keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan dunia kerja nyata.

I.2 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan praktek kerja profesi di Kabupaten Cirebon yaitu :

- a. Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) tahun 2011-2035.
- b. Mengidentifikasi Daerah Rawan Kecelakaan yang ada di Kabupaten Cirebon.
- c. Memberikan usulan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan yang telah diidentifikasi untuk mengurangi angka kecelakaan di Kabupaten Cirebon.

I.3 Manfaat

Dalam pelaksanaan praktek kerja profesi dan penyusunan laporan praktek kerja profesi II adapun beberapa manfaat yang diperoleh yaitu :

- a. Bagi Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ)

Hasil dari PKP II ini dapat bermanfaat bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk memperoleh informasi mengenai Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) di Kabupaten Cirebon.

- b. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dan Instansi terkait lainnya Manfaat dari hasil PKP II ini adalah memberikan informasi mengenai Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) kepada dinas-dinas yang terkait dalam penyusunan laporan praktek kerja profesi II Kabupaten Cirebon serta sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan upaya pencegahan atau penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka keselamatan lalu lintas.
- c. Bagi Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Sebagai sarana belajar dalam mengembah ilmu pengetahuan di lapangan dengan menerapkan ilmu yang telah kami peroleh dalam Pendidikan di kampus terkait keselamatan lalu lintas dan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas (RUNK).

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan laporan kinerja keselamatan transportasi jalan yang dimaksud dalam kegiatan PKP II Kabupaten Cirebon yaitu :

- a. Penilaian kinerja keselamatan didasarkan pada pelaksanaan lima pilar keselamatan dalam RUNK yaitu manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan paska kecelakaan.
- b. Analisis keselamatan jalan yang merupakan analisis kecelakaan lalu lintas dalam skala makro yang meliputi:
 - 1. Analisis kejadian kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan, factor penyebab kecelakaan, jenis kendaraan yang terlibat, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan Pendidikan, waktu kejadian kecelakaan serta lokasi kejadian berdasarkan status jalan.
 - 2. Identifikasi daerah rawan kecelakaan atau daerah potensi kecelakaan menggunakan berbagai metode disesuaikan dengan ketersediaan data disertai dengan pemetaannya.

- c. Penanganan daerah rawan kecelakaan dilakukan pada 3 (tiga) lokasi/daerah dengan bobot tertinggi berdasarkan hasil identifikasi dan pemeringkatan daerah rawan kecelakaan.

I.5 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan praktek kerja profesi II meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I atau Pendahuluan, diuraikan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada BAB II atau Gambaran Umum, diuraikan tentang sejarah lokasi PKP, profil, kelembagaan (struktur organisasi beserta tugas dan fungsi) dan fasilitas sarana prasarana, metode pelaksanaan dan pengumpulan data.

BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN RUNK

Pada BAB III atau Kinerja Penyelenggaraan RUNK, diuraikan mengenai 5 Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yaitu manajemen keselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan pasca kecelakaan.

BAB IV ANALISIS KESELAMATAN JALAN

Pada BAB IV atau Analisis Keselamatan Jalan, diuraikan tentang berbagai survei yang dilakukan dalam rencana keselamatan jalan meliputi survei kecepatan kendaraan, inventarisasi perlengkapan jalan, volume lalu lintas, konflik lalu lintas dan perilaku pengemudi serta rekomendasi yang akan diberikan dalam rencana keselamatan jalan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) II di Kabupaten Cirebon.